

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan sangatlah erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ialah suatu proses dalam menolong individu maupun sekelompok masyarakat yang terbelakang dan tidak berdaya karena bodoh serta miskin supaya mampu mandiri dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan di lingkungannya dengan memberikan kemampuan pengetahuan dan keterampilan sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar tercapainya sebuah kemajuan dan perubahan sosial di lingkungan masyarakat (Safri Miradj, 2021:18). Hasil yang diharapkan setelah dilakukan pemberdayaan masyarakat yakni mampu menjadi individu yang mandiri, berkualitas, mampu bersaing dan produktif dalam hidupnya.

Merujuk pada konsep pembangunan, untuk memajukan suatu daerah maka pendidikannya harus maju karena hal tersebut berpengaruh terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (Safri Miradj, 2021:5). Konsep pembangunan secara normatif dimaksudkan untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat dari kondisi yang kurang baik atau kurang maju menjadi lebih baik, maju, dan modern.

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya untuk memberdayakan segala potensi yang ada pada diri manusia. Menurut Widodo (2018: 10), pendidikan

bertanggungjawab pada pemberdayaan manusia yang potensial secara intelektual melalui proses *transfer of knowledge* dan potensial secara emosional dan spiritual melalui proses *transfer of values* yang terkandung di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan parameter yang menggambarkan kemampuan individu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selain itu, pendidikan mempunyai fungsi untuk mengajarkan nilai kemanusiaan, mempersiapkan tenaga ahli dalam suatu pekerjaan serta mempersiapkan sebagai masyarakat yang baik atau taat aturan (Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional tahun 2003).

Islam melalui kitab suci al-qur'an banyak mengajarkan manusia bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Surah Al Alaq ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahat. Itu artinya, selama masih bernyawa, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Berikut bunyi surat Al-alaq ayat 1-5 mengenai pentingnya pendidikan bagi manusia:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: “1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak di ketahuinya.”

Allah SWT melalui firmanNya ini hendak memberi tahu kepada manusia bahwa pendidikan adalah modal dan bekal yang sangat fundamental bagi manusia. Selain itu, ayat tersebut secara eksplisit dan implisit menggambarkan bagaimana pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis untuk membentuk manusia yang cakap dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai keinginan serta keahlian yang dimiliki dengan tidak melihat tingkat sosial, ras, etnis, agama, serta jenis kelamin. Sejalan dengan itu, menjamin pendidikan yang merata dan sepanjang hayat merupakan salah satu tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 tepatnya pada poin ke-4 yakni membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan seumur hidup yang berfungsi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Pembangunan*, Adon Nasrullah (2016:17) mengungkapkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk menciptakan kemampuan dan kecerdasan manusia. Meningkatnya SDM akan mempengaruhi perubahan ekonomi pada suatu daerah. Individu yang memiliki banyak pengetahuan dan kemampuan karena berpendidikan dapat membuat lapangan pekerjaannya sendiri atau bekerja dengan standar upah yang besar, dengan begitu tingkat kemiskinan juga dapat menurun. Pengembangan SDM dalam pembangunan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara memberikan

kesempatan pendidikan yang merata, layanan pendidikan yang optimal, pengajar yang berkompeten, prasarana dan sarana yang lengkap, serta pendidikan yang berkualitas namun murah.

Meskipun begitu, realitanya permasalahan pendidikan di Indonesia adalah cukup banyak masyarakat dengan riwayat pendidikan putus sekolah di tengah jalan dan tidak selesai masa pendidikannya di bangku sekolah disebabkan oleh berbagai macam latar belakang alasan seperti sekolah mahal, sekolah hanya menambah beban psikologis karena harus belajar, masalah keluarga, menikah muda dan sebagainya. Faktor kemiskinan merupakan salah satu penghambat bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia (Sonya Galatea, 2016:3).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Kemudian, jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yakni sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini naik 32,20% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11.378 orang. Berikutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia (Data Kemendikbudristek tahun 2021). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS),

jumlah buta aksara pada tahun 2021 adalah 3,96% atau sekitar 2,9 juta orang yang di dominasi oleh penduduk dewasa berusia 15 tahun ke atas (Data BPS tahun 2021).

Melihat kondisi dan permasalahan tersebut, maka perlu adanya penanggulangan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif dari putus sekolah seperti meningkatnya anak dan remaja putus sekolah, buta huruf pada orangtua dan terhambatnya pembangunan nasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pemberdayaan melalui pendidikan nonformal seperti memfasilitasi sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, dapat bersaing di dunia kerja dan membantu mencapai tujuan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan PKBM sebagai salah satu pendidikan nonformal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Program-program yang diselenggarakan di PKBM sangat beragam seperti Pendidikan Kesetaraan (kejar paket A, B dan C), Pendidikan Keaksaraan Fungsional, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Komputer dan sebagainya. Tujuan PKBM sendiri adalah memperluas kesempatan pendidikan masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan (Faridah Nurul, dkk. 2021:35).

Dadang Supriatna, Bupati Kabupaten Bandung mengakui bahwa pendidikan menjadi salah satu masalah di Kabupaten Bandung. Bahkan angka rata-rata sekolah hanya mencapai 8,79 tahun. Artinya masyarakat Kabupaten Bandung rata-rata tidak lulus SMP. Tercatat ada sekitar 15 ribu masyarakat yang belum menyelesaikan sekolah. Kondisi tidak lulus sekolah menjadi masalah pada pencarian kerja, sehingga Dadang mengatakan pihaknya terus berupaya agar masyarakat yang putus sekolah tersebut bisa memiliki ijazah melalui program pengambilan paket (Times Indonesia tentang data pendidikan di Kabupaten Bandung tahun 2022).

Untuk melancarkan hal tersebut, Bupati Bandung meminta agar aparat kewilayahan baik Kades maupun Camat untuk menggenjot pendirian PKBM di wilayah masing-masing. Dengan pendirian PKBM, diharapkan akan banyak masyarakat yang mengambil paket A, B maupun C sehingga bisa membantu masyarakat yang putus sekolah, baik karena masalah biaya atau hal lainnya untuk bisa memiliki ijazah. Bahkan bukan tidak mungkin, setelah memiliki ijazah melalui program paket, banyak masyarakat Kabupaten Bandung bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti perguruan tinggi.

Berdasarkan observasi, masyarakat Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung masih membutuhkan perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, dikarenakan masih cukup banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan buta huruf pada usia dewasa. Hal tersebut di akibatkan karena masalah ekonomi, menikah muda dan malas belajar karena hanya menambah beban psikologis.

Untuk membantu proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan sesuai yang terkandung dalam UUD tahun 1945 dan pengembangan SDM dalam pembangunan di bidang pendidikan maka aparaturnya Desa Rancakasumba dan karang taruna setempat memberdayakan masyarakat yang putus sekolah dengan memberikan alternatif pendidikan yakni program pendidikan kesetaraan yang difasilitasi oleh karang taruna setempat yang bekerja sama dengan PKBM Nura Amalia Kota Bandung.

Program pendidikan kesetaraan yang ada di Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung memberikan fasilitas sekolah gratis bagi masyarakat berusia di bawah 21 tahun yang putus sekolah terutama bagi masyarakat yang terhambat oleh masalah biaya. Dengan adanya program pendidikan kesetaraan ini, tampak jelas adanya harapan dan cita-cita masyarakat akan tercapainya kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat desa khususnya kelompok sasaran pemberdayaan merasa diperhatikan dan dihargai keberadaannya sebagai warga bangsa. Semangat untuk menjadi berdaya dan terampil sangat terasa saat program ini dilaksanakan.

Berlandaskan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin meneliti lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat putus sekolah melalui program pendidikan kesetaraan yang berada di Desa Rancakasumba. Penelitian ini penulis angkat dengan judul: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kesetaraan (Studi Deskriptif di Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung)”.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Adapun penelitian ini dilakukan karena beberapa permasalahan utama yaitu:

1. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan karena berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
2. Keberadaan program pendidikan kesetaraan di Desa Rancakasumba diharapkan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

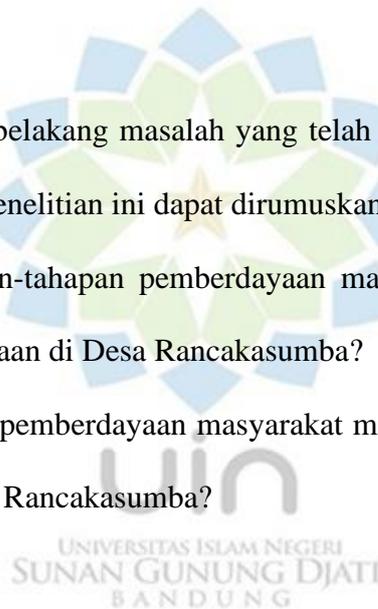
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan kesetaraan di Desa Rancakasumba?
2. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan kesetaraan di Desa Rancakasumba?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan kesetaraan di Desa Rancakasumba.
2. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan kesetaraan di Desa Rancakasumba.



1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Pelaksanaan sebuah penelitian selalu memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan perluasan pemikiran, referensi literatur dalam bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan sosiologi pembangunan dan sosiologi pendidikan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan di bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang diakibatkan dari masyarakat putus sekolah seperti kenakalan remaja, tindakan kriminalitas dan memberantas buta huruf terutama pada orang tua sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- b. Bagi pemerintah desa penelitian ini dapat digunakan untuk membantu tujuan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan sesuai yang terkandung dalam UUD tahun 1945 dan membantu mewujudkan salah satu tujuan SDGs tahun 2030 tepatnya pada poin

- 4 yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan seumur hidup.
- c. Bagi dunia pendidikan penelitian ini dapat di implementasikan untuk mengurangi angka masyarakat putus sekolah dan sebagai pertimbangan juga bahan evaluasi dalam hal memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh masyarakat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah sebuah alternatif strategi dalam pengembangan masyarakat (*community development*) yang mengedepankan pengembangan ilmu kecakapan hidup (*skill*) dalam pengajarannya. Pemberdayaan masyarakat ini banyak digunakan dalam pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat menurut Jim Ife adalah melalui peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*), yaitu melalui pendidikan dan pelatihan.

Proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, menjamin pendidikan yang merata dan sepanjang hayat merupakan salah satu tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) hingga tahun 2030 tepatnya pada poin ke-4 yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan seumur hidup yang berfungsi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pendidikan adalah melalui program pendidikan kesetaraan yang di fasilitasi

oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu pendidikan nonformal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum merata sehingga dapat menurunkan angka anak dan remaja putus sekolah, memberantas buta huruf dan membantu pembangunan nasional yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan solusi bagi masyarakat putus sekolah. Pendidikan kesetaraan disebut juga kejar paket A untuk setara SD (Sekolah Dasar), paket B untuk setara SMP (Sekolah Menengah Pertama) serta paket C untuk setara SMA (Sekolah Menengah Atas). Peserta didik dalam pendidikan kesetaraan selain mendapat wawasan seperti di pendidikan formal pada umumnya juga diberi pelatihan kecakapan hidup (*life skill*). Dengan menitik beratkan pada pemberian ilmu *life skill*, diharapkan peserta didik lulusannya dapat mandiri dan menciptakan lapangan kerjanya sendiri dari ilmu yang di dapat.

Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tidak luput ikut serta dalam memberdayakan masyarakat putus sekolah dengan program pendidikan kesetaraan. Aparatur desa dan karang taruna desa menjalin kerjasama dengan salah satu PKBM di Kota Bandung yaitu PKBM Nura Amalia untuk memperluas kesempatan pendidikan yang sama bagi masyarakat khususnya yang tidak mampu dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental

yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja agar memiliki penghasilan serta memberantas buta huruf bagi orang tua.

Suparjan dan Hempri Suyatno (dalam Fitrianti, 2014:208) menjelaskan bahwa konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada.

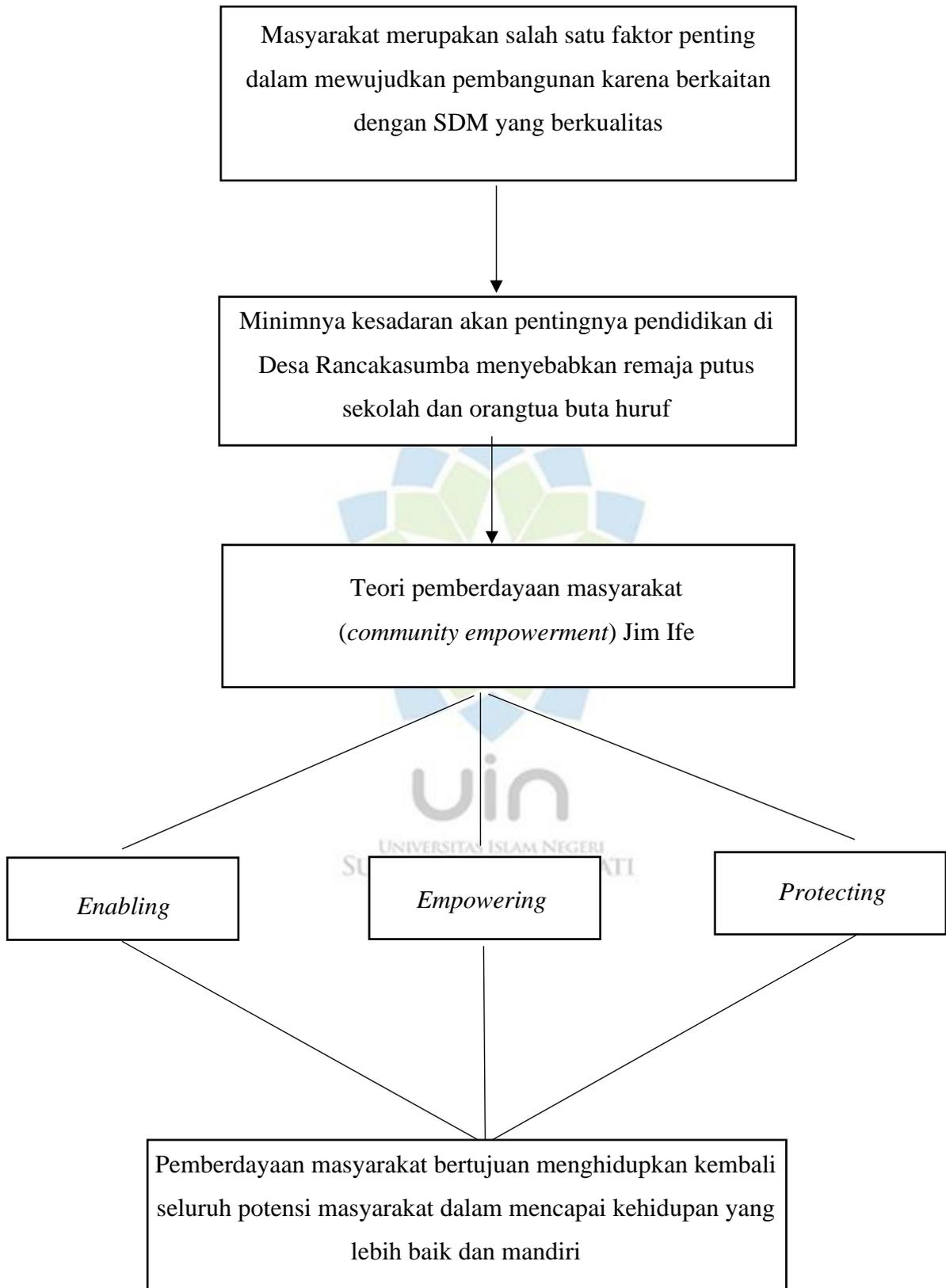
Dalam sosiologi pembangunan dikenal konsep *community development* yang pertama kali digunakan masyarakat pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1970. Konsep ini di adaptasi dari konsep pemberdayaan masyarakat. Secara umum, konsep *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pada hakikatnya *community development* adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal.

Chambers (dalam Widiyawati, 2020:90) menjelaskan bahwa *empowerment* (pemberdayaan masyarakat) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered participatory, empowering and*

sustainable. Upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yaitu *enabling, empowering and protecting*.

Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Sulistiyani (dalam Maharani 2012) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*).



Gambar 1.1 Skema Konsep Pemikiran